
Fikroh : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam

Volume. 14, Number. 1, Januari 2021

p-ISSN : 2087-7501, e-ISSN : 2715-4459

Hlm : 89-103

Journal Home Page : <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/fikroh>

KAPITALISASI PENDIDIKAN DAN AKSESTABILITAS BELAJAR

Abdul Muhid

UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

abdulmuhid@uinsby.ac.id

Idham Oka Laksana Putra

UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

idhamokalaksanaputra@gmail.com

Abstract

Education capitalization and Learning accesstability. Education has a much needed role for everyone to give new knowledge. Education requires materials that support it to be well-maintained. In accordance with the opening of the Contstitution 1945 is educate the life of the nation. Lately, education is used as a new tool to gain profit from all aspects in other words of the commercialization of education. The capitalization of this education can be felt by the parties who have a level of opinion below the average, they struggle to get the best education. Because good education requires complete and good facilities. The implementation can be seen from the expensive costs incurred to obtain the facility. Good education requires complete and good facilities. The implementation can be seen from the expensive costs incurred to obtain the facility. Every citizen has access to a decent education to foster their learning interest.

Keywords : *Education, Capitalization, Learning*

Abstrak

Pendidikan memiliki peranan yang sangat dibutuhkan oleh semua orang untuk memberikan pengetahuan baru. Pendidikan memerlukan bahan-bahan yang menunjang agar dapat terselenggara dengan baik. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Belakangan ini pendidikan dijadikan sebagai alat baru untuk meraih keuntungan dari segala aspek dalam kata lain komersialisasi pendidikan. Kapitalisasi pendidikan ini dapat dirasakan oleh pihak yang memiliki tingkat pendapat dibawah rata-rata, mereka kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang baik membutuhkan fasilitas yang lengkap dan bagus. Penyelenggaraan tersebut

dapat dilihat dari mahal nya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Setiap warga negara memiliki aksesstabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk menumbuhkan minat belajar mereka.

Kata Kunci: *Kapitalisasi, Pendidikan, Belajar*

A. Pendahuluan

Pendidikan menjadi pembicaraan menarik untuk didiskusikan dan diperdebatkan. Walau demikian pendidikan dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang rumit, membingungkan, dan terkesan tidak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Banyak sudah pergantian pejabat pendidikan untuk memberikan solusi kepada dunia pendidikan, namun tidak memberikan hasil yang signifikan dan malah memperkeruh permasalahan. Parahnya permasalahan yang belum diselesaikan menimbulkan permasalahan baru yang terus menggerus dunia pendidikan kita. Sudah menjadi hal lumrah terjadi di tiap tahun ajaran pendidikan yang terselenggara memberikan dampak buruk bagi masyarakat luas. Bagaimana tidak, berbagai macam kebijakan dan aturan yang tidak memiliki solusi aktif, terkesan main-main dan berujung pada ketidak pastian. Dapat kita lihat disetiap awal tahun ajaran baru kita selalu dipusingkan dengan hal yang selalu berulang dan tak ada penyelesaian. Salah satu contoh yakni berbagai macam aturan yang memberatkan masyarakat tentang penerimaan peserta didik baru, mulai dari uang gedung, seragam, buku-buku, perlengkapan alat tulis dan biaya “hantu” lainnya yang terus saja nominalnya bertambah.

Pada tanggal 31 Maret 2010 yang lalu mahkamah konstiusi membatallkan UU BHP, namun pengaruhnya terus menggerogoti dunia pendidikan. Bagaimana tidak biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat adalah 60 %, dikarenakan pemerintah hanya memberikan subsidi sebesar 40% saja. Sehingga kesenjangan ini berdampak hingga bangku perkuliahan, disebabkan mereka yang menikmati pendidikan fonrmal dari jenjang SD, SMp, SMA atau bangku perkuliahan hanya bagi mereka yang memiliki keuangan berlebih.¹ Pengaruh dari undang-undang yang terus berubah-ubah mengenai pendidikan terus diperdebatkan, jika merujuk pada UUD 1945 pasal 28 C dan dilanjutkan dengan UU. 20

¹ Imam Wahyudi, “ Komersiliasi Pendidikan Tinggi di Indonesia,” *Jurnal Tawazun*, 8, no. 1 (Januari-Juni 2015): 51.

tahun 2003 pasal 5 ayat 1,² seharusnya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak ditanggung dan diurus oleh pemerintah. Namun dengan perubahan kebijakan yang terkesan tidak memihak kepada kalangan berpenghasilan menengah kebawah, sangat berpengaruh terhadap fasilitas dan kualitas yang didapatkan. Karena pendidikan tidak lagi bisa dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, namun hanya mereka yang memiliki uang berlebih yang dapat mengakses dan merasakan fasilitas lengkap dalam dunia pendidikan.

Menurut Mua'rif dalam Mujahidun kebijakan mengenai otonomi pendidikan hanya mendukung mereka yang memiliki uang berlebih untuk mengakses pendidikan yang layak. Yang terjadi di setiap daerah lahir sekolah unggulan yang menjamu para peserta didik dengan fasilitas yang lengkap dengan pembiayaan yang fantastis. Dengan diberlakukannya otonomi pendidikan tersebut mendorong setiap sekolah menggunakan penataan keuangan dengan berlandaskan profit atau keuntungan.³ Budaya barat sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat modern diseluruh penjuru dunia termasuk di negara kesatuan negara Indonesia, paham-paham yang dijalani oleh seluruh bangsa di dunia ini adalah paham kapitalis, paham ini dikembangkan oleh Max Weber, termasuk dalam ranah pendidikan, sistem pendidikan kapitalis ini selalu memberikan pandangan baru untuk menjadikan metodologi dan juga penelitian menjadi kunci dari paham ini yang berakar pada rasio akal manusia yang lebih menutamakan keuntungan dalam kehidupan duniawinya. Yang terlepas semua bentuk pekerjaan yang dilakukan di dunia ini kepada ilahi yang menciptakan. Semua keberhasilan dan kesuksesan yang diakibatkan adalah bentuk kerja keras yang sudah dilaksanakan. Ranah dari kapitalis ini juga menyayat pendidikan yang berada di Indonesia.⁴

Sejalan dengan Didi Himan juga menyebutkan akan rusaknya pendidikan di Indonesia dikarenakan keikutsertaannya di kancah internasional yang menerangkan, Lembaga pendidikan telah dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi disaat masa kekuasaan orde baru dengan memasukan paham liberalisasi diberbagai lini kehidupan, salah satunya dalam dunia pendidikan. Hal ini diperkuat dengan adanya persetujuan berupa

² UU RI No.20Th. 2003, *Sisdiknas* 2003 (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2003, Cet. Ke-4, 2007), 6

³ Mujahidun, "Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan", *Tarbiyatun*, 7, no.1 (Juni 2016): 43.

⁴ Marjuni, "Kapitalisme dan Pendidikan Liberal," *Sulesana*, 6, no. 2 (2011): 193

penandatanganan pembentukan sebuah organisasi perdagangan internasional yang disebut dengan WTO (*World Trade Organization*) dan juga GATS (*General Agreement on Trade in Services*). Kedua organisasi ini menjadikan negara Indonesia pada masa orde baru harus menanggung beban berat yakni harus melaksanakan sebuah perdagangan bebas, yang dilandasi paham liberal untuk semua bentuk transaksi yang sedang dilakukan. Dalam hal ini WTO memasukkan sektor pendidikan menjadi bidang usaha yang sangat penting, yakni termasuk dalam kategori kebutuhan tersier. Sedangkan sektor primer yakni semua usaha dari pertambangan dan pertanian, dan sektor sekundernya meliputi semua pengolahan bahan-bahan dasar yang diolah menjadi beraneka ragam barang kebutuhan, baik untuk bangunan, manufaktur dan barang serba guna lainnya. Dilihat dari sektor kebutuhan, pendidikan merupakan kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Karenanya tidak jarang kita menemui berbagai macam sekolah nasional, maupun internasional berlomba-lomba untuk mengkoordinasi para orang tua peserta didik untuk menyekolahkan anaknya disekolahnya dengan biaya yang sangat tinggi. berbagai macam cara dilakukan agar sekolah tersebut terlihat mewah dengan segala perlengkapan sarana pembelajaran yang menunjang.

Pendidikan yang dijadikan sebagai kebutuhan tersier oleh WTO memiliki cakupan yakni pendidikan dasar, menengah, tinggi, dewasa dan lainnya. Yang memiliki empat program khusus penyediaan akan jasa pendidikan ini, yakni, Pendidikan tinggi luar negeri memberikan program pembelajaran jarak jauh yang dapat dilakukan dengan fasilitas internet (*on-line program*), yang nantinya pembelajaran dan kursus yang dilakukan dari jarak jauh (*distancing learning and tele course*) program ini dirangkum dalam legitimasi yang lebih dikenal dengan *Cross-border supply*. Selanjutnya program yang diminati mahasiswa yakni pengiriman mahasiswa Indonesia keluar negeri yang sangat dominan diarahkan pendidikan tinggi, sering disebut dengan *Consumption abroad* dimana para penyedia layanan jasa pendidikan pengiriman mahasiswa ini dapat mengakomodir segala keperluan selama proses keberangkatan hingga tiba diluar negeri. *Commercial Presence* yakni sekolah atau perguruan tinggi yang berada diluar negeri membangun fasilitasnya secara nyata di Indonesia dan *Presence*

of natural person hal ini memberikan kemudahan bagi para pengajar dan dosen asing mengajar pendidikan lokal di Indonesia.⁵

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah review jurnal yang mengutamakan penelusuran pustaka. Peneliti melakukan literature review terhadap jurnal-jurnal yang sudah pernah ada. Data-data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan tentang Kapitalisasi Pendidikan Dan Aksesibilitas Belajar.

C. Hasil dan Pembahasan

Menurut Imam Barnadib Pendidikan merupakan wadah untuk memberikan bantuan kepada peserta didik untuk menjadi lebih dewasa.⁶ Menjadikan berbagai bentuk kebutuhan yang ada untuk peserta didik dapat lebih aktif lagi dalam menerima berbagai sumber yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan belajarnya. Menjadi lebih dewasa dapat juga diartikan sebagai perubahan tingkah laku setiap peserta didik yang dilakukand alam kehidupan ya sehari-hari, baik berupa kegiatan yang dilakukan dalam keluarga maupun masyarakat sekitar. Dewasa dalam menyikapi setiap peristiwa yang dialami, karena peserta didik sudah meresapi makna pendidikan yang hakii yang sudah mereka dapatkan. Sedangkan Abdul Gani menyatakan bahwa usaha yang dilakukan manusia untuk menemukan inti dari sebuah ilmu agar ia dapat mencapai keutuhan dalam hidup.⁷ Dari pendapat tersebut dapat diuraikan bahwa pendidikan adalah usaha untuk mencari ilmu yang hakiki untuk menjadikan setiap individu menjadi lebih dewasa dalam menjalani kehidupan.

Pendidikan yang baik bagi setiap individu akan dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mereka dapat memberikan kontribusi bagi daerahnya untuk memajukan progam-progam yang ada disetiap lini. Berkat pendidikan tidak hanya berkembang dari segi personal saja, namun juga dari segi sosial akan berubah. Karena secara Nasional pendidikan memiliki tujuan yang tercantum dalam undang-undang sistem

⁵ Didi Hilman, "Kapitalisasi Pendidikan Dilihat Dari Perspektif Filsafat Hukum Pendidikan Islam," *Yustisi* 3, no. 1 (Maret 2016): 19

⁶ Wasitohadi, "Hakekat Pendidikan Dalam Perspektif John Dewey", *Satya Widya* 30, no. 1 (Juni 2014): 50.

⁷ St. Aisyah Abbas, "Hakekat Pendidikan Menurut Pakar Pendidikan", *As Shabab* 6, no. 1 (2020): 3.

pendidikan yakni : “Menjadikan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa, memiliki budi pekerti yang luhur, dengan pengetahuan yang baik dengan diikuti keterampilan, berbadan sehat dan kuat kerohanianya serta memiliki rasa tanggung jawab untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsanya”.⁸

Peran pendidikan sebagaimana yang dikemukakan Aronowitz dalam makmuri menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peranan sebagai *locus of struggle* dan juga sebagai instrumen negosiasi untuk peserta didik sebagai promotor pembangunan bangsa akan diarahkan kemana budaya, sosial dan ekonomi masyarakat dikemudian hari.⁹ Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam prinsip pendidikan dalam hal ini penulis memiliki pandangan pada tujuan dan prinsip dalam pendidikan islam. Pendidikan memiliki tujuan yakni untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata’ala dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan. Baik yang dilakukan secara personal maupun sosial.

Pendidikan yang berlandaskan akan pemahaman akan ketakwaan kepada Allah, memiliki peranan kepada pribadi yang memperoleh pendidikan yang baik untuk mengembangkan masyarakatnya untuk lebih baik dikemudian hari dengan tetap terarah sesuai garis yang ditentukan dalam Al Quran dan Al Hadist.¹⁰ Dalam pandangan islam sendiri yang diajarkan oleh Rasulullah, untuk dapat membaca dan dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negaranya melalui pembelajaran dengan memberantas buta huruf, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al Jumu’ah ayat 2 yang artinya; ” *Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As-Sunnah) Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.*”¹¹

Dalam pengertian tersebut jelas bahwa islam mengajarkan agar setiap pribadi untuk belajar dan menghapus buta huruf, untuk dapat membaca berbagai bacaan yang ada baik membaca ilmu-ilmu samawi maupun ilmu pengetahuan umum. Senada dengan itu Indonesia memiliki asas pancasila sebagai dasar negara yang didalamnya terdapat

⁸ Mutma’inah, “ Progam Tahfidz Al Quran dan Komersialisasi Pendidikan,” *Jurnal Of Islamic Education Policy* 3, no. 1 (2018): 30.

⁹ Makmuri Sukarno, “ Mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Untuk menjawab Tantangan Modernisasi, Demokratisasi Dan Globalisasi,” *Jurnal kependudukan Indonesia* 9, no. 2 (Desember 2014): 121.

¹⁰ Didi Hilman, “ Kapitalisasi Pendidikan Dilihat Dari Prespektif Filsafat Hukum Pendidikan Islam,” *Yustiti* 3, no. 1 (Maret 2016): 21.

¹¹ Q.S. al-Jumu’ah [62]: 2

pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea ke- 4 menyebutkan bahwa memiliki pondasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan membaca setiap individu dapat mendapatkan penghidupan yang layak untuk dapat bersaing dengan berbagai pihak, termasuk bersaing dalam kancah internasional. Membaca yang didapatkan melalui program pendidikan menjadi pijakan dasar untuk dapat bersaing baik untuk kehidupan yang lebih baik dan juga untuk bersaing dengan bangsa lain untuk memajukan bangsa dan negara. Membaca merupakan ajaran Islam yang merupakan wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al Alaq diajarkan untuk mendalamai pengetahuan. Dalam pembukaan undang-undang 1945 yang telah disebutkan diatas, menjadi acuan bahwa membaca merupakan suatu tolak ukur untuk meningkatkan daya guna dan daya fikir setiap individu untuk memperoleh pengetahuan. Oleh sebab itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.

Setiap warga negara Indonesia yang akan berjuang untuk memperjuangkan Indonesia dikemudian hari harus memiliki pondasi yang kuat untuk dapat mengenal dan mengatasi masalah yang ada disekitar lingkungannya dengan mempunyai keterampilan hidup yang mumpuni (*Life Skill*). Dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 sudah disebutkan tentang prinsip system pendidikan Nasional yaitu:

1. Demokratis dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi setiap hak manusia dalam memperoleh pendidikan, yang berlandaskan akan nilai keagamaan dan budaya.
2. Sistematis, yaitu sebuah layanan yang terbuka dan multi penjabaran. Yang dapat diakses oleh seluruh peserta didik sepanjang kehidupan ini berlangsung.
3. Memberikan keteladanan, memotivasi dan mengembangkan seluruh kreativitas dalam diri peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran.
4. Terselenggaranya budaya membaca atau literasi dan juga kelistung (baca, tulis, dan hitung) bagi seluruh masyarakat.
5. Penyelenggaraan pendidikan melalui pemberdayaan seluruh pihak masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat untuk memantau dan mengendalikan kualitas pendidikan.¹²

¹² Didi Hilman, " Kapitalisasi Pendidikan," 20.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut sudah jelas bahwa warga negara Indonesia harus memiliki ilmu yang mumpuni untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya. Dengan bermodalkan pendidikan yang layak dan mempunyai mutu yang sesuai dengan standar nasional. Tidak hanya sampai di situ saja, pendidikan juga butuh akan peranan masyarakat sekitar untuk membantu dan mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki.

1. Kapitalisasi dalam Dunia Pendidikan

Pada mulanya kapitalisme merupakan bentuk perlawanan paham dari sosial ekonomi atas ajaran Katolik untuk memberikan perlawanan kepada sekularisme dan materialisme. Perlawanan ini muncul akibat paham kapitalisme bahwa sebuah nilai pekerjaan dan kebutuhan akan duniawi merupakan garis ketentuan yang ditepatkan Tuhan. Menurut teori Weber, alasan akan keterbatasan yang religius dan penuh dengan doktrin keagamaan ini, menjadi dorongan bagi kaum materialisme untuk menjadikan paham kapitalisme semakin pesat.¹³ Adanya pemikiran akan pemahaman ajaran yang sedemikian rupa membawa Kapitalisme mengarah pada berbagai sektor lainnya salah satunya pada dunia pendidikan. Pendidikan dijadikan sasaran empuk untuk mendapatkan keuntungan untuk mensejahterakan kehidupan dunia.

Pada tahun 2017 gadis remaja asal Brebes harus putus sekolah akibat salah program pendidikan pemerintah yang tidak dirasakan oleh semua anak¹⁴. Kasus putus sekolah juga terjadi di kecamatan Moutong Sulawesi tengah, dari studi kasus yang dilakukan Kulyawan ada 61 anak yang putus sekolah yang diakibatkan ekonomi.¹⁵ Perubahan yang terjadi dalam pendidikan tidak terlepas dari peranan ekonomi yang menyelimuti dunia pendidikan di era sekarang.¹⁶ Dunia pendidikan mulai berorientasi terhadap jalannya sebuah profit, pemasukan, untung dan juga bisnis yang dilakukan oleh para kapitalis untuk mendapatkan hasil dari komersialisasi pendidikan. Pendidikan sudah berubah fungsi dari pada untuk mencerdaskan manusia dan berganti menjadi

¹³ Marjuni, "Kapitalisme dan Pendidikan Liberal," 194.

¹⁴ <https://pendidikan.id/main/forum/diskusi-pendidikan/diskusi-pendidikan-aa/9380-sudah-tahun-2017-masih-ada-cerita-anak-putus-sekolah-karena-biaya>, Dikutip pada 8 Juni 2020.

¹⁵ Roy Kulyawan, "Studi Kasus Tentang Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Moutong", *Edu Civic* 3, no. 2 (2015): 10.

¹⁶ Sholehuddin, "Tantangan Pesantren Dalam Komersialisasi Pendidikan Di tengah Globalisasi", *Lentera Pendidikan* 15, no. 2 (Desember 2012): 226.

pendidikan yang menghasilkan untung dan rugi.¹⁷ Komersialisasi pendidikan menurut Habibie adalah sebuah proses yang mengantarkan seseorang untuk menjadi pekerja untuk sektor industri, dan bukan lagi sebagai sarana untuk mengantarkan seseorang memiliki kecerdasan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitarnya.¹⁸

Jika pendidikan hanya untuk mencetak pekerja murah dan bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemukaan Undang-undang dasar 1945 hanya akan menjadi dasar negara tanpa makna. Peranan penting pemerintah untuk memberikan layanan program pendidikan secara merata kepada seluruh anak di Indonesia, tidak ada perbedaan antara anak miskin dan kaya. Program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah harusnya menjembatani mereka yang kurang mampu dalam hal ekonomi agar dapat merasakan pendidikan yang layak dan bermutu dan bukan untuk ajang mencari keuntungan dan kesenangan dunia semata.

2. Arah Kapitalisasi pendidikan

Pada zaman kolonial belanda telah terjadi tradisi yang sangat agung dengan memberdayakan masyarakat untuk menunjang pendidikan yang lebih baik dengan diadakan sedekah. Namun proses pembiayaan pendidikan dari masyarakat itu kini berubah menjadi pembiayaan yang dilakukan oleh orang tua masing-masing peserta didik untuk membayar biaya sekolah dengan menyamaratakan biaya pendidikan tanpa melihat tingkat ekonomi keuangan orang tua setiap peserta didik.¹⁹ Sekolah yang dinaungi oleh pemerintahan ataupun yayasan perorangan atau golongan sudah menganut komersialisasi pendidikan. Ada biaya yang harus dibayarkan orang tua untuk dapat masuk kesekolah tersebut. Biaya yang masuk kesekolah tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan sekolah dan dan lainya untuk gaji pengelola dan pendidik. Bila hal demikian dilakukan oleh sekolah swasta yang memberikan jumlah nominal yang bernilai fantastis kemungkinan besar yang dapat menjangkaunya adalah mereka yang memiliki tingkat ekonomi yang kuat. Dan bagi mereka yang memiliki tingkat ekonomi lemah akan mengalami kesusahan untuk

¹⁷ Miftachul Ulum, "Eksistensi Pendidikan Pesantren: Kritik Terhadap Kapitalisasi Pendidikan," *Ta'lim : Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, no. 2 (Juli 2018): 249.

¹⁸ Asmirawanti, "Komersialisasi Pendidikan," *Jurnal Equilibrium* 4, no. 2 (November 2016): 177.

¹⁹ Marjuni, "Kapitalisme dan Pendidikan Liberal," 198.

menyekolahkan anak nya disekolah swasta. Namun jika pungutan keuangan dengan jumlah besar dilakukan oleh sekolah dibawah naungan pemerintahan. Hal ini menjadi masalah besar. Dimana seluruh dana yang didapatkan sekolah tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah, namun dengan berbagai macam alasan dan segala kebutuhan yang ingin dicapai, sekolah menginginkan pemasukan yang lebih untuk memberikan kentungan pribadi bagi mereka yang bermain dalam komersialisasi pendidikan.

Komersialisasi pendidikan memberikan pengertian mendasar yakni mencari keuntungan atau profit. Setiap lembaga pendidikan yang menggunakan komersialisasi, pasti akan bersaing untuk menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas untuk dapat bersaing dengan sekolah lainya. Jika dalam bidang pendidikan komersialisasi sangat berhubungan tingkat kuantitas peserta didik yang masuk kesekolah tersebut. Dengan jumlah peserta didik yang semakin banyak.²⁰ Komersialisasi yang dilakukan untuk mencari keuntungan dalam pandangan islam bertolak belakang dengan tujuan pendidikan islam itu sendiri. Islam mengajarkan untuk menjadikan setiap manusia dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Setiap manusia memiliki peranan untuk mengubah hidup diri dan orang lain untuk menjadi lebih baik dikemudian hari. Memberikan pengaruh yang baik untuk orang lain dan menjadikan seseorang men

3. Hakikat Belajar

Menurut Djamarah dalam Aprida menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar peserta didik menjadi kunci dalam kegiatan pendidikan.²¹ Proses dari pengajaran adalah peserta didik mampu memenuhi tahapan dan tujuan dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan tersebut tercapai, apabila peserta didik aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Keaktifan peserta didik dapat dilihat dari kegiatan fisik dan kejiwaanya saat mengikuti pembelajaran. Apabila peserta didik tidak hanya aktif pada kegiatan fisik dan mental anak tersebut tidak berubah, maka tujuan dari kegiatan pembelajaran belum tercapai. Perubahan yang dialami setiap peserta didik berbeda-beda tergantung bagaimana kadar kemampuan anak menangkap makna dalam setiap pembelajaran. Saat

²⁰ Murni Eva Marlina Rumaepa, " Pendidikan Kemersial dan Gaya Hidup", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 5, no. 2 (2017): 141.

²¹ Aprida Pane, "Belajar dan Pembelajaran", *Fitrah* 3, no. 2 (Desember 2017): 334.

pembelajaran berlangsung pendidik memiliki cara untuk memberik kesan yang mendalam saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media dan fasilitas yang diberikan sekolah. Pembelajaran dengan menggunakan media merupakan hal baru yang dapat dilakukan saat pembelajaran dapat berupa video, gambar, teks dan dan lainnya. Media baru atau dalam istilah lain *novelty* dapat membantu peserta didik dalam merespon pembelajaran, hal ini sepadan dengan Hamalik bahwa peserta didik akan tertarik terhadap kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan pendidik saat memberikan pelajaran.²²

4. Layanan Pendidikan Bernuansa Kapital

Sekolah unggulan memberikan pelayanan terbaik kepada anak yang dititipkan sebagai peserta didik.²³ Pelayanan yang diberikan oleh sekolah unggulan harus memperhatikan apa yang menjadi kendala selama penyelenggaraan berlangsung berjalan dengan baik dan maksimal. Orang tua memberikan kucuran dana yang sangat tinggi untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Dan pastilah yang dapat membayarkannya adalah dari kalangan orang tua dengan penghasilan ekonomi tinggi. Oldfield dan Baron menekankan akan pentingnya layanan yang diberikan sekolah unggulan untuk menjamin mutunya harapan orang tua dan peserta didik yang mendalam pembelajaran di sekolah tersebut. Adanya interaksi yang baik dengan orang tua sebagai pelanggan harus diperhatikan.²⁴ Dalam hal ini sekolah yang mengutamakan kepentingan pelanggan akan selalu menjadi fasilitator kepada orang tua yang telah membayar dengan harga tinggi. Pendidikan yang lebih baik perlu dukungan dari berbagai lini, termasuk dalam hal pendanaan.²⁵

Pendidikan merupakan upaya untuk memberikan manfaat kepada banyak orang dan dapat merubah seseorang menjadi lebih baik. Memberikan manfaat kepada orang

²² Sigit Hariyadi, DYP Sugiharto, Anwar Sutoyo, "Bimbingan Kelompok Teknik *Biblio-Counseling* Berbasis Cerita Rakyat Untuk Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Siswa SMP," *Jurnal Bimbingan Konseling* 3, no. 2 (2014): 102.

²³ Agus Prianto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Orang Tua Siswa terhadap Layanan Pendidikan di Sekolah: Studi pada sekolah unggulan di Kabupaten Jombang," *Jurnal Aplikasi Manajemen* 9, no. 3 (Mei 2011): 1066.

²⁴ Oldfield dan Baron, "Student Perception of Service Quality in UK University Business and Management Faculty," *Quality Assurance in Education* 8, no. 2 (2000): 85-95.

²⁵ Edison, "Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional: Investasi Pendidikan VS Komersialisasi Pendidikan," *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 18, no.1 (Mei 2013): 81.

lain jika dilihat dari pandangan islam tidak hanya berupa kebutuhan akan untung dan rugi, namun lebih besar dari pada itu. Pendidikan yang dikomersialkan hanya akan memberikan keuntungan berupa materi kepada pihak tertentu yang mendapatkan hasil. Namun bagi mereka yang menjalankan progam pendidikan akan merasakan efek dari untung dan rugi dalam komersialisasi pendidikan yaitu ilmu yang tidak bermanfaat.

5. Aksestabilitas dalam Belajar

Pemerintah sebagai penopang dari seluruh kegiatan roda kehidupan rakyat indonesia memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat dalam lini manapun. Pendidikan merupakan elemen penting yang harus diperhatikan pemerintah. Dengan anggaran APBN yang dikucurkan untk biaya pendidikan sebesar 20% , sekiranya perlu ada peningkatan yagn signifikan dalam dunia pendidikan. Anggaran yang disusun oleh pemerintah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, daerah dan lembaga terkait. Pernyataan tersebut tertuang dalam (pasal 1 butir 40 UU no.4 3 tahun 2012 tentang perubahan atas UU no.22 tahun 2011 tentang APBN tahun anggaran 2012).²⁶ Undang-undang tersebut seyogyanya dapat dipergunakan secara maksimal oleh pemerintah daerah agar kasus putus sekolah yang terjadi di brebes, Moutuong Sulawesi Tengah dan daerah-daerah di indonesia yang belum terdeteksi dapat merasakan proses belajar mengajar yang layak.

Progam pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun bukan hanya isapan jempol semata, ada realitas yang di[erhatikan untuk mnunjang terselenggaranya progam tersebut. setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang dapat memaksimalkan dirinya dalam menentukan jalan hidup mereka dikemudian hari. Belajar merupakan aktifitas yang dilakukan anak setiap harinya untuk menambah pengetahuan dan informasi baru setiap harinya. Sarana prasarana dalam belajar perlu terus ditingkatkan, dengan memaksimal anggaran yang sudah ditentukan. Anggaran untuk proses pembelajaran harus mengenai sasaran yang ingin dicapai dan tidak berhenti pada golongan tertentu.

D. Simpulan

²⁶ https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2012_4.pdf, Diakses Pada 8 Juni 2020

Pendidikan yang memiliki arah dan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan berorientasi pada penciptaan peserta didik yang memiliki kualitas pendidikan yang baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pembelajaran dengan fasilitas yang mewah dan ruangan yang megah bukan menjadi ukuran sekolah ataupun lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai lembaga yang berhasil dalam mencetak peserta didik yang memiliki daya saing di kancah nasional dan internasional. Kapitalisasi pendidikan merupakan upaya menjadikan generasi penerus bangsa hanya sebagai pekerja dengan upah minim. Orientasi pendidikan yang dicermintakan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa hanya akan menjadi dasar negara tanpa realita dilapangan. Banyaknya anak Indonesia yang putus sekolah merupakan bukti bahwa kapitalisasi pendidikan sudah menjangkiti dunia pendidikan. Faktor ekonomi rendah merupakan pemicu anak-anak Indonesia tidak merasakan pendidikan yang layak dan bermutu.

Dari hasil penelitian tersebut penulis mengungkapkan bahwa Pendidikan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia perlu dukungan dari berbagai pihak. Kesenjangan dan diskriminasi terhadap golongan tertentu yang ingin mendapatkan pendidikan bermutu perlu dihilangkan, agar setiap peserta didik mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang dapat mengantarkan mereka membangun potensi dan bakat mereka di kemudian hari. Pemerintah sebagai penguasa tertinggi agar menjalankan program-program yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dengan melihat data-data di lapangan dan mengevaluasi kinerja pihak-pihak terkait untuk mengontrol terselenggaranya program pemerintah secara menyeluruh tanpa memilih dan memihak golongan tertentu.

E. Daftar Pustaka

- Abbas, St. Aisyah. "Hakekat Pendidikan Menurut Pakar Pendidikan." *As Shabab* Vol. 6, No. 1 (2020): 1-10.
- Abdullah, Muhammad Faisal M. 2014. "Psikologi Pendidikan Dalam Al-Quran." *Jurnal Ilmiah Psikologi* 5 (2014).
- Asmirawanti. "Komersialisasi Pendidikan." *Jurnal Equilibrium* Vol.4, No. 2 (2016): 174-183.
- Baron, Oldfield "Student Perception of Service Quality in UK University Business and Management Faculty." *Quality Assurance in Education* Vol. 8, No. 2 (2000): 85-95.

- Edison. "Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional: Investasi Pendidikan VS Komersialisasi Pendidikan." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol. 18, No. 1 (2013): 72-87.
- Hilman, Didi. "Kapitalisasi Pendidikan Dilihat Dari Prespektif Filsafat Hukum Pendidikan Islam." *Yustiti* Vol. 3, No. 1 (2016): 19-23.
- Kulyawan, Roy. "Studi Kasus Tentang Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Moutong." *Edu Civic* Vol. 3, No. 2 (2015): 1-12.
- Mansir, Firman. "Pendekatan Psikologi Dalam kajian Pendidikan Islam." *Jurnal Psikologi Islami* 78.
- Marjuni. "Kapitalisme dan Pendidikan Liberal." *Sulesana* Vol.6, No.2 (2011): 192-205
- Mujahidun. "Pemerataan Pendidikan Anak bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan." *Tarbiyatuna* Vol. 7, No. 1 (2016): 38-52.
- Mutma'inah. "Progam Tahfidz Al Quran dan Komersialisasi Pendidikan." *Jurnal Of Islamic Education Policy* Vol.3, No. 1 (2018): 25-34.
- Pane, Aprida. Belajar dan Pembelajaran." *Fitrah* Vol. 3, No. 2 (2017): 333-352.
- Prianto, Agus. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Orang Tua Siswa terhadap Layanan Pendidikan di Sekolah (Studi pada sekolah unggulan di Kabupaten Jombang)." *Jurnal Aplikasi Manajemen* Vol. 9, No. 3 (2011): 10661-1074.
- Rahmawati, Ita. 2020. *pendidikan.id*. Juni Ahad.
- RI, DPR. n.d. https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2012_4.pdf, Diakses Pada 8 Juni 2020. Accessed Juni 8, 2020.
- Rumapea, Murni Eva Marliana. "Pendidikan Kemersial dan Gaya Hidup." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* Vol. 5, No. 2 (2017): 139-148.
- Sholehuddin. "Tantangan Pesantren Dalam Jimersialisasi Pendidikan Di tengah Globalisasi." *Lentera Pendidikan* Vol.15, No. 2 (2012): 221-230.
- Sigit Hariyadi, DYP Sugiharto, Anwar Sutoyo. 2014. "Bimbingan Kelompok Teknik Biblio-Counseling Berbasis Cerita Rakyat Untuk Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Siswa SMP." *Jurnal Bimbingna Konseling* Vol. 3, No. 2 (2014): 98-103.
- Sisdiknas. *UU RI NO.20 Th 2003*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sukarno, Makmuri. "Mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Untuk menjawab Tantangan Modernisasi, Demokratisasi Dan Globalisasi." *Jurnal kependudukan Indonesia* Vol. 9, No. 2 (2014): 119-137.
- Ulum, Miftachul. "Eksistensi Pendidikan Pesantren : Kritik Terhadap Kapitalisasi Pendidikan." *Ta'lim : Jurnal Studi Pendidikan Islam* (2018): 249.
- Wahyudi, Imam. 2015. "Komersiliasi Pendidikan Tinggi di Indonesia." *Tawazun* Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni 2015), 49-71.

Wasitohadi. 2014. "Hakekat Pendidikan Dalam Prespektif John Dewey." *Satya Widya Vol. 30, No. 1 (Juni 2014)*, 49-61.